

1. Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan :

Dasar Hukum adalah SP DIPA Nomor: DPA/067.07.4.350350/2023 tanggal 30 Nopember 2022 Untuk Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi (Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM Sarana Pengembangan Kawasan)

**2. Gambaran umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi
Instansi Pemberi Tugas**

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

3. Capaian Kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan

a. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.161.593.000,-, meliputi kegiatan :,- realisasi anggaran Rp. 2.159.617.612,- (99,91 %), kegiatan dan realisasi SPM sebagai berikut:

- 1.** Permasalahan Tanah Transmigrasi yang difasilitasi di UPT. Aemuri Kabupaten Ende dengan alokasi anggaran Rp. 25.860.000,- realisasi 25.832.000,- (100%)
- 2.** Fasilitasi Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SJP pada Kawasan Transmigrasi di Kabupaten SP. Remasingfui Kabupaten Alor, SP. Wemaringi Kabupaten Sumba Barat, dan SP. Ikiseo Gesu Kabupaten Negekeo dengan alokasi anggaran Rp. 67.800.000,- realisasi Rp. 67.800.000,- (100%) .
- 3.** Fasilitasi Layanan Sosial budaya Kepada Masyarakat di Satuan Permukiman / Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi dengan alokasi anggaran Rp. 133.470.000,- realisasi Rp. 133.470.000,- (100%).
- 4.** Fasilitasi Perpindahan dan Penempatan Transmigrasi di SP. Wemaringi Kabupaten Sumba Barat dan SP. Kotakawau Sp. 5 Kabupaten Sumba Timur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 273.424.000,- realisasi Rp. 273.107.000,- (100%).

- 5.** Bantuan Sarana produksi Pertanian yang dikembangkan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP di SP. Wemaringi Kabupaten Sumba Barat dan UPT. Kotakawau Sp. 5 Kabupaten Sumba Timur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 113.235.000,- realisasi Rp. 113.110.000,- (100%).
- 6.** Rehabilitasi dan Konservasi lahan di Satuan Permukiman dan pusat SKP di SP. Wemaringi Kabupaten Sumba Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- realisasi Rp. 199.759.000,- (100%).
- 7.** Lahan Non Status yang dibangun di Kawasan transmigrasi di SP. Wemaringi Kabupaten Sumba Barat dan UPT Ikiseo Gesu Kabupaten Nagekeo dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 315.120.000,- realisasi Rp. 314.945.000,- (100%).
- 8.** Lahan yang dibuka untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi bagi 20 KK, per KK 0,9 Ha di UPT. Wemaringi Kabupaten Sumba Barat dan UPT. Kotakawau Sp. 5 Kabupaten Sumba Timur dengan alokasi anggaran Rp. 101.970.000,- realisasi Rp. 101.820.000,- (100%).
- 9.** Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi di SP. Fatukoko Kabupaten TTS dan SP. Remasingfui Kabupaten Alor dengan alokasi anggaran Rp. 267.540.000,- realisasi Rp. 266.990.000,- (100%).
- 10.** Bantuan Peralatan/Sarana di Sp. Wemaringi Kabupaten Sumba Barat dan SP. Kotakawau Sp. 5 Kabupaten Sumba Timur dengan alokasi anggaran Rp. 555.674.000,- realisasi Rp. 555.284.612,- (100%).

A. Kerjasama Antar Pemerintah Pusat dan Daerah**1. Daerah yang Diajak Kerjasama**

Daerah yang diajak kerjasama adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan yang selanjutnya disebut Pengelolaan Terpadu Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi (Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM Sarana Pengembangan Kawasan) secara terintegrasi, sistematis, akuntabel dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan Program Ketransmigrasian.

2. Dasar Hukum

Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.214/MEN/V/2007 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi melalui Dana Tugas Pembantuan;

3. Bidang Kerjasama

Bidang Ketransmigrasian Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

4. Nama Kegiatan

Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi (Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok UKM Sarana Pengembangan Kawasan)

Sumber dana yang diterima dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia sebesar Rp. 2.161.593.000,-

5. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Dana Tugas Pembantuan di mulai dari Januari sampe dengan Bulan Desember 2023

a. Target Kinerja dalam perjanjian kinerja

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Menjadikan Koperasi sebagai lembaga Koperasi yang mampu mewadai seluruh aktifitas produksi masyarakat (anggota)			Program Kewirausahaan dan UMKM (DEKON)	520.236.000
	% Koperasi aktif	100%	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (DAK NON Fisik dan DAU)	3.345.413.000
	% Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	7%		
	% Pembentukan Koperasi Perempuan	20%		
Meningkatnya jumlah UKM melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan Usaha Besar	% Peningkatan Nilai Transaksi UMKM	100%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) DAK Non Fisik	3.345.413.000
	% Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	100%		
	% Kelompok perempuan yang mendapatkan bantuan modal usaha	78%		
	% Kelompok perempuan yang mendapat pelatihan kewirausahaan	85%		
Terciptanya pelayanan penempatan	% Peserta	90%	Peningkatan	2.595.241.000

tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja lokal (ALK), antar kerja antar daerah (AKAD), antar kerja antar negara (AKAN), pendayagunaan tenaga kerja sukarela, teknologi tepat guna dan padat karya.	pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibandingkan jumlah peserta pelatihan		kompetensi Kerja dan produktifitas (Dekon)	
	% penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	60%	Program Penempatan Tenaga Kerja (APBD)	753.397.800
	% Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	55%		
	% Meningkatnya PMI Prosedural	85%		
	% Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi	90%		
Terciptanya hubungan industrial yang dinamis, pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial, penanganan permasalahan PH/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP dan Peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan			Program Pembinaan Ketenagakerjaan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dekon)	375.214.000
	% Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi	90%	Program Hubungan Industrial (APBD)	249.999.400
	Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan	85%		
Terwujudnya perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja,			Perlindungan TK dan Pengembangan sistem kepengawasan naker	227.134.000

keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan			(Dekon)	
	% pemeriksaan perusahaan oelh pengawas	65%	Program Pengawasan Ketenagakerjaan (APBD)	149.999.100
	% Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja	70%		
Terbangunnya wilayah pengembangan transmigrasi (WPT) dan lokasi Unit permukiman transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran	% Warga transmigrasi yang tertangani	100%	Penyiapan kawasan dan pembangunan pemukiman Trans. (Dekon)	2.161.593.000
		100%	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi (APBD)	1.199.998.848
		100%	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (APBD)	
			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi (APBD)	
Jumlah Anggaran Tahun 2023			Dekonsentrasi	4.245.267.000
			Tugas Pembantuan	2.161.593.000
			APBD	31.422.755.876

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Adapun Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT tahun 2023, sebagai berikut:

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T (%)	REALISA SI (%)	% CAPAIA N	PROGRAM	ANGGARAN			
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Terwujudnya koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota)	1	% Koperasi aktif	100	77,63	77,63	Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam (DAK Non Fisik dan APBD)	9.277.459.600	6.129.834.780	66,07
		2	% Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	7	3,68	52,53				
		3	% Pembentukan Koperasi Perempuan	20	0,47	2,33				
2	Meningkatnya nilai transaksi UMKM melalui peningkatan permodalan UMKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UMKM dan peningkatan kemitraan UMKM dengan usaha besar	4	% Peningkatan Nilai Transaksi UMKM	100	98,47	98,47	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (APBD)	1.264.000.000	762.501.240	60,32
		5	% Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	100	9,02	9,02				
3	Terwujudnya UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan pelaku UKM	6	% Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha	78	0,60	0,77				
		7	% Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	85	0,86	1,01				
4	Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara	8	% Peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	90	28,13	31,25	Program Penempatan Tenaga Kerja (APBD)	753.397.800	217.367.400	28,85
		9	% Penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	60	36,72	61,20	Program Penempatan Tenaga Kerja (APBD)	753.397.800	217.367.400	28,85
			% Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	55	58,60	106,55	Program Penempatan Tenaga Kerja (APBD)			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T (%)	REALISA SI (%)	% CAPAIA N	PROGRAM	ANGGARAN			
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
5	(AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya; Terciptanya Hubungan Industrial yang Dinamis, harmonis, berkeadilan dan martabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melaui perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS	11	% Meningkatnya PMI Prosedural	85	68,03	80,03	Program Penempatan Tenaga Kerja (APBD)	249.999.400	22.231.450	8,89
		12	% Jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi	90	18,82	20,92	Program Hubungan Industrial (APBD)			
		13	% Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	85	58,67	69,02	Program Hubungan Industrial (APBD)			
6	Ketenagakerjaan Terwujudnya perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketanagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan	14	% Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	65	18,82	28,96	Program Pengawasan Ketenagakerjaa n (APBD)	149.999.100	-	0,00
		15	% Jumlah perusahaan yang melaksanakan norma kerja di NTT	70	18,82	26,89	Program Pengawasan Ketenagakerjaa n (APBD)			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T (%)	REALISA SI (%)	% CAPAIA N	PROGRAM	ANGGARAN			
							PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
7	Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran serta terfasilitasi pembinaannya	16	% Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	100	88,24	88,24	Program Perencanaan Transmigrasi (APBD)	424.999.300	51.114.460	12,03
		17	% Lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	100	94,12	94,12	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (APBD)	299.999.900	99.925.880	33,31
		18	% Unit permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	100	86,36	86,36	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi (APBD)	474.999.648	92.010.320.	19,37

a. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Untuk melakukan Analisis Capaian Kinerja pada Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT dilakukan dengan membandingkan target sasaran strategis dengan realisasinya akan didapat persentasi naik atau turun.

Adapun Analisis Capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1:

Menjadikan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota).

Tabel 1

Menjadikan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2022	2023		Capaian	Renstra (2023)
				Target	Realisasi		
	% Koperasi Aktif	%	96	100	77,63	77,63	96
Rata-rata						77,63 %	

Capaian Indikator Kinerja

Perkembangan jumlah Koperasi di Provinsi NTT selama periode Tahun 2020-2023 mengalami pertumbuhan positif. Dari jumlah koperasi tahun

2020 sebanyak 4.137 unit menjadi 4.185 unit pada tahun 2021 dan bertambah lagi menjadi 4.291 unit per November 2022.

Sedangkan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif mengalami fluktuasi selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada Tahun 2019 koperasi yang aktif sebanyak 3.776 unit, turun menjadi 3.635 unit pada Tahun 2020, turun lagi menjadi 3.339 unit per November 2022 dan turun lagi menjadi 3.334 unit per Desember Tahun 2023.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 1, maka % koperasi yang aktif target 100%, realisasinya sebesar 77,81%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 1 yaitu menjadikan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota)mencapai **77,63 %** atau masuk dalam kategori **Berhasil**.

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya jumlah UKM melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar.

Tabel 2

Meningkatnya Jumlah UKM melalui Peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2022	2023		Capaian	Renstra (2023)
				Target	Realisasi		
	% Ijin Usaha Simpan Pinjam	%	5	7	3,68	52,53	7
Rata-rata						52,53%	

Capaian Indikator Kinerja

Sebaran Koperasi di Provinsi NTT Tahun 2020-2022 berjumlah 4.185 unit, yang terdiri dari skala Ijin Usaha sebanyak 75 unit.

Pada tahun 2023 Koperasi yang difasilitasi ijin usaha simpan pinjamnya menjadi 122 unit, hal ini mengalami kenaikan.

Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya jumlah ijin usaha simpan pinjam peningkatan dengan usaha besar mencapai **52.53 %** atau masuk dalam kategori **Belum Berhasil**.

Sasaran Strategis 3:

Terwujudnya UKM baru di lokasi pariwisata melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM pelaku UKM.

Tabel 3

Terwujudnya UKM baru di Lokasi Pariwisata melalui pengembangan usasa berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM pelaku UKM

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2022	2023		Capaian	Renstra (2023)
				Target	Realisasi		
	% Pertumbuhan UKM baru di Pariwisata Estate	%	68	100	9,02	9,02	100
Rata-rata						9,02%	

Capaian Indikator Kinerja

Dari jumlah UKM di Provinsi NTT Tahun 2020 sebanyak 56.971 unit, yang berada di lokasi pariwisata berjumlah 68 unit. Sedangkan pada tahun 2021 posisi per September menunjukkan perubahan jumlah UKM dibandingkan tahun 2022, yaitu sebanyak 104.188 unit. Yang berada di lokasi pariwisata bertambah jumlahnya menjadi 86 unit.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 3, maka % pertumbuhan UKM baru di pariwisata estate realisasinya sebesar 114,23 %. Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 3 yaitu terwujudnya UKM baru di lokasi pariwisata melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM pelaku UKM masuk dalam kategori **Belum Berhasil**.

Sasaran Strategis 4:

Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya.

Tabel 4

Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan erluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar kerja Lokal (AKL), Antar kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga Kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya;

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2022	2023		Capaian	Renstra (2023)
				Target	Realisasi		
	% Peserta Pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	%	80	90	28,13	31,25	90
Rata-rata						31,25%	

Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2023 jumlah Jumlah lulusan peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh Bidang Ketenagakerjaan Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT dan UPTD Latihan Kerja sebanyak 256 orang. Dari jumlah tersebut lulusan pelatihan yang bersertifikat kompetensi hanya berjumlah 72 orang. Masih diupayakan untuk semua lulusan peserta latihan bisa mengikuti uji kompetensi, sehingga semua lulusan bisa bersertifikat kompetensi.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 4, maka % Peserta Pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah lulusan peserta pelatihan dari target 90 %, realisasinya sebesar 28,13 %, dan capaian 31,25%

Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 4 yaitu terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja

sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikatornya masuk dalam kategori **Belum Berhasil**.

Tabel 5

Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan erluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar kerja Lokal (AKL), Antar kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga Kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya;

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2022	2023		Capaian	Renstra (2023)
				Target	Realisasi		
	% Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	%	50	55	58,60	106,55	55
Rata-rata						106,55 %	

Capaian Indikator Kinerja

Tahun 2023 jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 2.389 orang dan yang berhasil ditempatkan hanya berjumlah 1.400 orang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari penempatan pencari kerja.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 5, maka % Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan dari target 55 %, realisasinya 58,60 %. Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 4 yaitu terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja

sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 6

Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan Perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar kerja Lokal (AKL), Antar kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga Kerja sukarela, Teknologi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2022	2023		Capaian	Renstra (2023)
				Target	Realisasi		
	% Penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	%	55	60	36,72	61,20	60
Rata-rata						61,20%	

Capaian Indikator Kinerja

Pada tahun 2023 secara keseluruhan lulusan pelatihan sebesar 256 orang yang terserap didunia usaha/dunia kerja sebanyak 94 orang atau dengan realisasi 61,20 % .

Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 6 yaitu terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang masuk dalam kategori **Cukup Berhasil**.

Sasaran Strategis 5:

Terciptanya Hubungan Industrial yang Dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melauai perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 7

Terciptanya Hubungan Industrial yang dinamis, Harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, Penanganan permasalahan PHI/PHK dan Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP an peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2022	2023		Capaian	Renstra (2023)
				Target	Realisasi		
	% Besaran Kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	80	85	58,67	69,02	85
Rata-rata						69,02 %	

Capaian Indikator Kinerja

Persentase besaran kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama tahun 2022 sebesar 91,55 %, yaitu dari 71 kasus yang diadukan hanya 65 kasus yang dapat diselesaikan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, maka pada Tahun 2023 Persentase besaran kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama sebesar 58,67 %, yaitu dari 75 kasus yang diadukan sebanyak 44 diselesaikan melalui perjanjian bersama.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 5, maka % besaran kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama dari target 85 %, realisasinya mencapai 58,67 %.

Dengan demikian capaian sasaran strategis 5 yaitu terciptanya Hubungan Industrial yang Dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melaui perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masuk dalam kategori **Cukup Berhasil**.

Sasaran Strategis 6:

Terwujudnya perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan.

Tabel 8

Terwujudnya perlindungan tenaga yang ptimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketenagakerjaan serta penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2022	2022		Capaian	Renstra (2023)
				Target	Realisasi		
	% Pemeriksaan Perusahaan oleh pengawas	%	55	65	18,82	28,96	65
Rata-rata						28,96 %	

Capaian Indikator Kinerja

Jumlah pemeriksaan perusahaan pada tahun 2023 sebanyak 1.210 kali dari keseluruhan jumlah perusahaan sebanyak 6.428 perusahaan.

Jumlah pengawas ketenagakerjaan yang terbatas (24 pengawas) tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada di NTT (6.428 perusahaan), sehingga harus ada penambahan jumlah pengawas ketenagakerjaan.

Sesuai dengan Sasaran Strategis 6, maka % pemeriksaan perusahaan oleh pengawas dari target sebesar 65 %, realisasinya sebesar 28,96 %.

Dengan demikian capaian sasaran strategis 6 yaitu terwujudnya perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan masuk dalam kategori **Belum Berhasil**.

Sasaran Strategis 7:

Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran.

Tabel 9

Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga Transmigran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2022	2022		Capaian	Renstra (2023)
				Target	Realisasi		
	% Kawasan dan Lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	%	85	100	88,24	88,24	100
Rata-rata						88,24 %	

Capaian Indikator Kinerja

Kawasan transmigrasi yang dibangun dan fungsikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Kab. Sumba Timur/UPT. Kotakawau SP.5 1 lokasi, 13 unit Rumah, 15 KK/46 Jiwa;
- b. Kab. Sumba Barat/UPT. Wemaringi sebanyak 1 lokasi, 5 Unit Rumah, 5 KK/27 Jiwa;

Persentase besaran kawasan transmigrasi yang dibangun dan fungsikan pada tahun 2023 adalah sebesar 100 %, dimana telah dibangun beberapa Lokasi sebagai berikut:

- a. Transmigran Penduduk Setempat (TPS):
 - ✓ UPT. Kotakawau SP 5, Kab. Sumba Timur sebanyak 13 KK/46 jiwa.
 - ✓ UPT. Wemaringi, Kabupaten Sumba Barat sebanyak 5 KK/27 jiwa

Sesuai dengan Sasaran Strategis 7, maka % Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya dari target 100 %, dengan realisasi mencapai 88,24 %.

Dengan demikian capaian sasaran strategis 7 yaitu Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Untuk melakukan Analisis Capaian Kinerja pada Dinas Kopnakertrans Provinsi NTT dilakukan dengan membandingkan target sasaran strategis dengan realisasinya akan didapat persentasi naik atau turun. Adapun Analisis Capaian Kinerjanya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Pemb. Jk Menengah (Renstra 2023)	Target SKPD 2023	Realisasi	Capaian	Ket
1	% Koperasi aktif	%	100	100	77,81	77,63	Berhasil
2	% Pertumbuhan UKM	%	100	100	98,47	98,47	Sanagt Berhasil
3	% Pertumbuhan UKM Baru di Pariwisata estate	%	100	100	9,02	9,02	Belum Berhasil
4	% Peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan .	%	90	90	28,13	31,25	Belum Berhasil
5	% Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	55	55	58,60	106,55	Sangat Berhasil
6	% Penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	%	60	60	36,72	61,20	Cukup Berhasil
7	Besaran kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama	%	85	85	58.67	69.02	Cukup Berhasil

8	% Pemeriksaan perusahaan oleh pengawas	%	65	65	18.82	28.96	Belum Berhasil
9	% Warga Transmigrasi yang tertangani	%	95	100	100	94,12	Sangat Berhasil

c. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya kaitan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

1. SDM

Sumber daya manusia merupakan aset utama organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. SDM digambarkan dalam 3 indikator yaitu : Pendidikan, Jenis kelamin dan golongan. Dalam menjalankan tugas pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh 213 pegawai yang terdiri dari 25 Jabatan Struktural dan 188 staf dengan rincian sebagai berikut :

Total	Jenis Kelamin		Pendidikan					Golongan		
	L	P	SMP	SMA	D3	S1	S2	II	III	IV
159	99	60	-	33	10	99	17	24	117	18

Tabel diatas dapat dijelaskan jumlah PNS Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur menurut jenis kelamin perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan hampir sama, menurut jenjang pendidikan : Jenjang pendidikan PNS Kopnakertrans Provinsi NTT terdiri dari S2 19 orang, S1 99 orang, D3 10 orang dan SMA 33

Orang dimana jumlah PNS yang berpendidikan S1 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah S2, Jumlah PNS menurut golongan : Golongan IV 18, Golongan III 117 dan Golongan II sebanyak 24 orang. komposisi pegawai yang ada sangat memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada, namun harus diperhatikan kembali peningkatan kemampuan dan ketrampilan untuk mencapai efektifitas

dan kinerja yang baik melalui pendidikan dan pelatihan formal bagi aparaturnya.

2. Sarana Prasarana

Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam pelayanan publik membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Sarana dan Prasarana yang ada pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SUMBER DANA
1	Tanah	20 Bidang	APBD & APBN
2	Bangunan	104 Unit	APBD & APBN
3	Peralatan Mesin : - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 2	17 Unit 36 Unit	APBD & APBN APBD & APBN
4	Alat Pendinginan : - AC	103 Unit	APBD
5	Alat Rumah Tanggal lainnya - TV Warna - Kulkas - Wireless	5 unit 4 unit 7 unit	APBD & APBN APBD & APBN APBD & APBN
6	Alat Penyimpanan Perlengkapan : - Lamari besi/filling cabinet - Lemari arsip kayu - Lemari pakaian - Rak arsip - Rak Perpustakaan - Meja Biro - Meja ½ Biro - Kursi kerja - Kursi Biro	12 Unit 37 Unit 8 Unit 32 Unit 2 Unit 31 Unit 139 Unit 149 Unit 5 Unit	APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD
7	Peralatan Komputer : - Komputer - Laptop - Spiner	21 Unit 44 Unit 1 Unit	APBD APBD APBD

8	Alat Kantor lainnya : - Camera - LCD - Sound system	7 Unit 14 Unit 8 Unit	APBD APBD APBD
9	Alat Penggandaan - Mesin ketik manual	5 Unit	APBD
10	Alat Komunikasi : - Faximili	3 Unit	APBD

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas didukung dengan sarana dan prasarana gedung kantor, peralatan dan mesin (Komputer, Laptop, Notebook), dan fasilitas kendaraan operasional. Pada awal tahun Anggaran (Bulan Maret) 2022 telah dilakukan penggabungan Dinas antara Dinas Koperasi dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan menempati gedung Eks Badan Litbangda Provinsi NTT di Gedung E lantai II, yang mana lantai satu ditempati oleh UPT Samsat Kota Kupang, lantai II ditempati oleh Diskopnakertrans Provinsi NTT dan sebagiannya oleh UPT Samsat Kota Kupang, sedangkan lantai III ditempati oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT.

Untuk sarana dan prasarana belum memadai karena masih kekurangan ruangan dimana masih ada sebagian pegawai yang duduk dilorong-lorong kantor demikian juga dengan peralatan/mesin khususnya Laptop/notebook dimana masih banyak pegawai yang melaksanakan tugas /bekerja dengan menggunakan laptop/notebook pribadi sehingga perlu penambahan laptop/notebook dimaksud.

3. Anggaran

Anggaran yang dialokasi untuk Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebesar 33.195.173.654; dan dalam Perjalanan di Revisi Menjadi 31.422.755.876; rincian anggaran dapat dilihat padat tabel berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	Belanja Daerah	31.422.755.876,-	24.131.151.914,-	80,15
	BELANJA OPERASI	31.420.532.876	24.131.151.914	76,80
	Belanja Pegawai	18.527.901.128	16.756.066.384	90,44
	Belanja barang dan Jasa	6.624.131.748	4.166.585.530	62,90
	Belanja Hibah	56.000.000	56.000.000	100
	Belanja Bantuan sosial	6.212.500.000	3.152.500.000	50,74
2.	Belanja Modal	2.223.000	2.223.000	100
	TOTAL BELANJA	31.422.755.876,-	24.131.151.914	76,80

Dari alokasi anggaran yang ada sebesar Rp. 31.422.755.876 yang terdiri dari belanja langsung Rp. 12.894.854.748 realisasi Rp. 7.377.308.530 (23,48%) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 20.448.843.000 realisasi Rp. 15.477.219.655 (75,69%) dari total anggaran tersebut yakni Rp. 32.827.913.617 realisasi sebesar Rp. 26.310.872.086 (80,15%). Dari anggaran yang ada ini hampir seluruh kegiatan terserap meskipun secara rincian kegiatan masih ada yang bekum mencapai target atau belum berhasil, namun secara keseluruhan capaian kinerjanya baik.

d. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	Realisasi (%)	% CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN		
						PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menjadikan Koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif asyarakat (anggota)	% Koperasi aktif	100	77,81	77,63	Program Pelayanan Ijin Usaha Simpan Pinjam (DAK Non Fisik dan APBD)	9.277.459.600	6.129.834.780	66,07
	% Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam	7	3,68	52,53				
	% Pembentukan Koperasi Perempuan	20	0,47	2,33				
Meningkatnya Jumlah UKM melalui peningkatan oemodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan Pelaku Usaha UKM	% Peningkatan Nilai Transaksi UMKM	100	98,47	98,47	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (APBD)	1.199.998.848	762.501.240	60,32
	% Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate	100	9,02	9,02				
Terwujudnya UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan pelaku UKM	% Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha	78	0,60	0,77				
	% Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	85	0,86	1,01				

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	Realisasi (%)	% CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN		
						PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme antar kerja lokal (AKL), Antar kerja Daerah (AKAD), Antar kerja antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja Sukarela, Teknologi Tepat Guna dan Padat Karya	% Peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	90	28,13	31,25	Penempatan Tenaga Kerja (APBD)	753.397.800	217.367.400	28,85
	% Penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja	60	36,72	61,20				
	% Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	55	58,60	106,55				
Terciptanya Hubungan Industrial yang dinamis, harmonis berkeadilan dan bermartabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, Penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	% Jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi	85	89,69	80,03	Program Hubungan Industrial (APBD)	249.999.400	22.231.450	8,89
	% Kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan	85	58,67	69,02				
	% Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas	65	18,82	28,96				
Terwujudnya perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan					Program Pengawasan Ketenagakerjaan (APBD)	149.999.100	149.999.100	0,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	Realisasi (%)	% CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN		
						PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketenagakerjaan erta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan kerja (SMK3) di perusahaan	% Jumlah perusahaan yang melaksanakan norma kerja di NTT	70	18,82	26,89				
Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran serta terfasilitasi pembinaannya	% Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	100	88,24	88,24	Program Perencanaan Transmigrasi (APBD)	424.999.300	51.114.460	12,03
	% Lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	100	94,12	94,12	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (APBD)	299.999.900	99.925.880	33,3
	% Unit permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya	100	86,36	86,36	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi (APBD)	474.999.648	92.010.320	19,37
JUMLAH					Dekon	4.245.267.000	4.198.951.470.	98,91
					Tugas Pembantuan	2.161.593.000	2.159.617.612	99,91
					APBD	31.422.755.876	24.131.051.914	76,79

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Kondisi Bulan Januari sampai dengan Desember 2023 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, Januari 2024

**KEPALA DINAS
KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**

SYLVIA R. PEKU DJAWANG, SP.MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19680512 199503 2 003

